

Incitec Pivot Limited

Kebijakan

Perbudakan Modern

Nomor Dokumen: **POL-IPLG-PROC-000015**

Pemilik Kebijakan: **Pejabat Komersial Eksekutif**

Tanggal Berlaku: **19 Desember 2019**

Status: **Dirilis**

Daftar Isi

1. Tujuan.....	3
2. Lingkup.....	3
3. Referensi & Definisi	3
3.1 Referensi	3
3.2 Definisi.....	3
4. Peran dan Tanggung Jawab	4
5. Pernyataan Kebijakan: Rantai Pasokan	4
5.1 Identifikasi Risiko dalam Rantai Pasokan	4
5.1.1 Alat Pemeringkatan Pemasok	4
5.1.2 Kuesioner Risiko Pemasok.....	5
5.2 Manajemen Risiko Pemasok.....	5
5.3 Tindakan untuk Mengatasi Risiko Teridentifikasi dalam Rantai Pasokan.....	5
5.4 Kesadaran Karyawan dan Kontraktor.....	5
5.4.1 Pelatihan	5
5.4.2 Pelaporan	5
5.4.3 Kesadaran Pemasok.....	5
6. Pernyataan Kebijakan: Operasi IPL.....	5
6.1.1 Risiko Pekerja Anak	6
6.1.2 Risiko Penyalahgunaan oleh sumber daya yang dipekerjakan oleh, atau dikontrak untuk, IPL	6
6.1.3 Penyediaan Mekanisme Pengaduan Formal untuk Karyawan dan Komunitas Lokal	6

Incitec Pivot Limited (IPL) dan seluruh anak perusahaan mendukung pemberantasan Perbudakan Modern dan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam rangka mengidentifikasi, menilai dan mengatasi risiko Perbudakan Modern dalam operasi perusahaan.

1. Tujuan

Kebijakan ini akan digunakan sebagai dasar dan untuk menginformasikan setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh IPL tentang potensi risiko praktik Perbudakan Modern dalam operasi dan rantai pasokan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perbudakan Modern.

2. Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama IPL, dalam kapasitas apa pun, termasuk karyawan, direktur, pejabat, pekerja agen, kontraktor dan konsultan serta perwakilan pihak ketiga lainnya.

3. Referensi & Definisi

3.1 Referensi

Tabel 1: Referensi

Referensi	Judul
https://www.incitecpivot.com.au/~media/Files/IPL/Corporate%20Governance%20documents/Human%20Rights%20Policy_2019.pdf	Kebijakan Hak Asasi Manusia
https://www.incitecpivot.com.au/~media/Files/IPL/Corporate%20Governance%20documents/Human%20Rights%20Policy_2019.pdf	Pedoman Perilaku Pemasok

3.2 Definisi

Istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Kebijakan ini memiliki arti sebagai berikut:

Standar Perusahaan HSEC 11 berarti standar versi saat ini yang tersedia dalam sistem manajemen dokumentasi elektronik IPL.

IPL berarti Incitec Pivot Limited dan seluruh anak perusahaannya.

Perbudakan Modern mempunyai arti sebagaimana dalam Undang-Undang Perbudakan Modern. Istilah ini digunakan untuk mencakup berbagai praktik eksploitatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan manusia, perbudakan, pekerja paksa, pekerja anak dan perbudakan utang. Undang-Undang Perbudakan Modern berarti Undang-Undang Perbudakan Modern 2018 (Cth) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Whistleblower Hotline (Saluran Khusus Pelapor) berarti mekanisme yang disediakan untuk melaporkan secara rahasia perilaku yang tidak pantas, ilegal atau tidak etis sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Pelapor.

Whistleblower Protection Policy (Kebijakan Perlindungan Pelapor) berarti prinsip-prinsip yang memungkinkan seseorang untuk mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan suatu tindakan yang tidak dapat diterima baik yang diketahui maupun yang dicurigai.

4. Peran dan Tanggung Jawab

Tabel 2: Peran & Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Pejabat Komersial Eksekutif	Pemilik Kebijakan
Dewan Direksi IPL	Tanggung jawab menyeluruh untuk memastikan IPL patuh terhadap semua kewajiban hukum dan etis perusahaan
Tim Eksekutif	Bertanggung jawab untuk memastikan timnya patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini dalam pelaksanaan peran mereka sehari-hari.
Manajer Lini	Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bawahan langsung yang terkait menerima pelatihan yang memadai tentang kebijakan ini dan setiap proses pendukung yang sesuai untuk peran mereka.

5. Pernyataan Kebijakan: Rantai Pasokan

Bagian ini menetapkan proses-proses yang mengidentifikasi dan mengatasi risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan IPL.

Bagian ini selaras dengan Nilai-Nilai IPL yaitu:

- Bahaya Nol untuk Semua Orang, di Mana Saja,
- Menghargai Orang – Penghormatan, Pengakuan dan Penghargaan,
- Peduli terhadap Komunitas dan Lingkungan kita,
- Uji dan tingkatkan Keadaan Sekarang.

5.1 Identifikasi Risiko dalam Rantai Pasokan

Alat berikut ini akan digunakan baik untuk mengidentifikasi maupun melakukan mitigasi terhadap potensi risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan IPL. Alat tersebut dirancang untuk membantu pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas uji tuntas (*due diligence*) pemasok dalam mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan perbudakan modern.

5.1.1 Alat Pemeringkatan Pemasok

Analisis biaya yang dikeluarkan untuk pemasok yang ada saat ini dilakukan dengan menggunakan Supplier Tiering Tool (Alat Pemeringkatan Pemasok). Analisis ini menilai biaya tahunan, risiko yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dibeli, serta negara asal pemasok. Alat tersebut menghasilkan peringkat keseluruhan yang mengidentifikasikan pemasok-pemasok yang berisiko lebih tinggi, agar dapat diprioritaskan untuk dilakukan penilaian risiko yang lebih detil untuk ditindaklanjuti.

5.1.2 Kuesioner Risiko Pemasok

Pemasok yang Ada Saat ini

Kuesioner Risiko diterapkan kepada pemasok yang saat ini diberikan peringkat risiko tinggi oleh Alat Pemeringkatan Pemasok, kemudian diterapkan kepada pemasok dengan risiko menengah hingga rendah.

Pemasok Baru

Untuk calon pemasok dan pemasok baru, Kuesioner Risiko akan dikirim kepada para pemasok tersebut sebagai bagian dari proses Pengadaan standar.

5.2 Manajemen Risiko Pemasok

Jawaban pemasok atas kuesioner yang menunjukkan adanya potensi risiko akan dilakukan investigasi. Jika diperlukan, rencana perbaikan akan disepakati bersama pemasok tersebut beserta sasaran dan jangka waktu untuk mencapainya.

5.3 Tindakan untuk Mengatasi Risiko yang Teridentifikasi dalam Rantai Pasokan

Rencana perbaikan akan disepakati antara IPL dan pemasok tersebut untuk menentukan tindakan tepat yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Rencana perbaikan tersebut akan ditinjau secara berkala oleh IPL dan pemasok terkait.

5.4 Kesadaran Karyawan dan Kontraktor

5.4.1 Pelatihan

Karyawan dan kontraktor yang ditunjuk wajib menyelesaikan modul pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perbudakan modern dan pemahaman tentang faktor-faktor risiko, untuk membantu mengidentifikasi risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan IPL.

Pelatihan khusus ini akan diberikan kepada individu-individu yang perannya diidentifikasi lebih terpapar risiko Perbudakan Modern.

5.4.2 Pelaporan

Karyawan dan kontraktor IPL didorong untuk melaporkan setiap risiko praktik Perbudakan Modern dalam rantai pasokan IPL baik yang diketahui maupun dicurigai, bila memiliki alasan yang kuat. Kebijakan Perlindungan Pelapor memberikan pedoman berkenaan dengan pelaporan tersebut.

5.4.3 Kesadaran Pemasok

Seluruh pemasok IPL wajib mematuhi Pedoman Perilaku Pemasok IPL dan wajib bekerja sama dengan IPL untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko Perbudakan Modern dalam rantai pasokan mereka masing-masing.

Seluruh pemasok diharapkan segera menyampaikan pemberitahuan kepada IPL mengenai setiap risiko praktik-praktik Perbudakan Modern dalam rantai pasokan mereka yang mereka ketahui ataupun dicurigai, bila memiliki alasan yang kuat dan bekerja sama dengan IPL sehubungan dengan rencana perbaikan untuk mengatasi risiko tersebut.

6. Pernyataan Kebijakan: Operasi IPL

Bagian ini menetapkan proses-proses yang mengidentifikasi dan mengatasi risiko praktik-praktik Perbudakan Modern dalam operasi IPL.

Bagian ini selaras dengan Nilai-Nilai IPL yaitu:

- Bahaya Nol untuk Semua Orang, di Mana Saja,
- Menghargai Orang – Penghormatan, Pengakuan dan Penghargaan,
- Peduli terhadap Komunitas dan Lingkungan kita,
- Uji dan tingkatkan Keadaan Sekarang.

6.1 Identifikasi Risiko dalam Operasi IPL

Peninjauan atas operasi dan proses akan dilakukan untuk negara-negara berisiko tinggi yang tidak menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan/atau yang hukumnya tidak mengatur secara memadai mengenai proses pencegahan pekerja anak atau pelanggaran hak asasi manusia.

6.1.1 Risiko Pekerja Anak

Terapkan proses pencatatan dan uji tuntas (audit atas catatan) sehubungan dengan usia orang-orang yang dipekerjakan dalam operasi IPL di negara-negara yang ditetapkan pada bagian 6.1.

6.1.2 Risiko Penyalahgunaan oleh sumber daya yang dipekerjakan oleh, atau dikontrak untuk, IPL

Terapkan proses pencatatan dan uji tuntas (audit atas catatan) sehubungan dengan pelatihan yang tepat untuk sumber daya yang dipekerjakan oleh IPL di negara-negara yang ditetapkan pada bagian 6.1.

6.1.3 Penyediaan Mekanisme Pengaduan Formal untuk Karyawan dan Komunitas Lokal

Penyediaan informasi tentang Saluran Khusus Pelapor milik IPL, kontak di lokasi atau mekanisme lainnya yang sesuai secara budaya setempat untuk melaporkan potensi permasalahan di semua lokasi IPL, yang dapat diaudit berdasarkan Standar Komunitas HSEC 11.